

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Desa sejatinya memiliki beragam potensi yang sangat bernilai, baik dari segi Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM), yang seharusnya dapat menjadi modal utama dalam mendorong pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan (Permana & Setiawan, 2024). Namun kenyataannya, berbagai potensi tersebut masih tersebar secara terpisah dan belum terintegrasi secara optimal dalam satu sistem pengelolaan yang solid, sehingga pemanfaatannya cenderung bersifat individual atau hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekayaan desa belum mampu diolah secara kolektif untuk memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan bersama, bahkan potensi yang belum terkelola dengan baik tersebut terbukti belum memberikan kontribusi berarti terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang lebih terarah dan kolaboratif agar potensi desa benar-benar menjadi penggerak utama perekonomian lokal (Wahyudi dkk., 2025).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal. Pendirian BUMDesa di tiap-tiap desa bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Musmini dkk., 2024). Dengan diberikannya

otonomi kepada desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya ekonomi desa secara mandiri dan profesional, di mana salah satu aspek pentingnya adalah penyusunan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana dan kinerja manajerial (Rohman, 2025). Di Provinsi Bali, perkembangan BUMDesa terus meningkat, didorong oleh upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk memperluas kehadiran BUMDesa di setiap desa. Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali menunjukkan perkembangan pesat dengan hampir setiap desa memiliki BUMDesa. Data BUMDesa yang ada di Kabupaten Buleleng dapat diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setempat. Adapun data mengenai jumlah BUMDesa di Kabupaten Buleleng disajikan pada bagian akhir laporan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
BUMDesa Se-Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah BUMDesa
1.	Kubutambahan	13	13
2.	Tejakula	10	10
3.	Sawan	14	14
4.	Sukasada	13	13
5.	Buleleng	12	12
6.	Banjar	17	17
7.	Seririt	21	19
8.	Busungbiu	15	14
9.	Gerokgak	14	13
Total		129	125

Sumber: DPMD Kab. Buleleng (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai jumlah BUMDesa se-Kabupaten Buleleng, dapat dilihat bahwa dari total 129 desa yang ada, telah terbentuk 125 BUMDesa. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi dalam pendirian BUMDesa, meskipun masih terdapat empat desa yang belum memiliki BUMDesa. Jika diperinci, hampir semua kecamatan memiliki jumlah BUMDesa yang sama

dengan jumlah desanya, seperti di Kecamatan Kubutambahan, Tejakula, Sawan, Sukasada, Buleleng, dan Banjar. Namun, masih terdapat kecamatan yang belum sepenuhnya mendirikan BUMDesa, misalnya Kecamatan Seririt dengan 21 desa tetapi baru memiliki 19 BUMDesa, Kecamatan Busungbiu dengan 15 desa dan 14 BUMDesa, serta Kecamatan Gerokgak dengan 14 desa dan 13 BUMDesa. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun perkembangan BUMDesa di Kabupaten Buleleng sudah sangat pesat, perlu ada maksimalisasi potensi.

Kualitas suatu laporan keuangan ditentukan oleh berbagai kriteria yang harus dipenuhi. Menurut Lestari dan Dewi (2020), kualitas laporan keuangan merupakan ukuran sejauh mana laporan tersebut dapat disajikan oleh sumber daya manusia dengan benar dan tepat sehingga mampu memberikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan berfungsi sebagai dasar penilaian sekaligus bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan organisasi, sehingga setiap BUM Desa diharapkan memiliki laporan keuangan yang berkualitas (Dwiyanti & Werastuti, 2021). Tingkat kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari kesesuaiannya dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Berdasarkan PSAK 1, karakteristik tersebut mencakup: (a) dapat dipahami, (b) relevan, (c) andal, dan (d) dapat dibandingkan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Oleh karena itu, BUM Desa perlu menekankan kualitas laporan keuangannya, karena aspek inilah yang akan memengaruhi setiap keputusan pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan merupakan instrumen utama pertanggungjawaban pengelolaan dana dan aktivitas usaha BUMDes kepada masyarakat desa dan pemerintah. Kualitas laporan keuangan yang baik tercermin dari kemampuannya untuk dapat dipahami oleh pengguna, relevan dalam pengambilan keputusan, andal

dalam mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, serta dapat dibandingkan antarperiode maupun antarunit usaha. Apabila keempat karakteristik tersebut tidak terpenuhi, maka informasi keuangan yang dihasilkan berpotensi kehilangan nilai guna sebagai dasar evaluasi kinerja dan perencanaan usaha BUMDes. Kabupaten Buleleng memiliki peran strategis dalam pengembangan BUMDes di Provinsi Bali. Kabupaten ini menempati posisi kedua dengan jumlah BUMDes terbanyak, yakni 123 BUMDes dari 129 desa, serta menjadi penerima dana desa terbesar dengan total penyaluran pada tahun 2023 mencapai Rp132.727.227.000 (Sistem Informasi Desa, 2024). Bahkan, Buleleng dikenal sebagai “kabupaten BUMDes” karena pada akhir tahun 2019 mampu mencatatkan omzet sebesar Rp60,9 miliar dengan laba Rp11,2 miliar (Prasetya, 2020). Besarnya potensi ekonomi tersebut menuntut adanya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas agar keberadaan BUMDes benar-benar mampu mendorong kemandirian ekonomi desa.

Tabel 1.2
Data Omset BUMDes di Kabupaten Buleleng

No.	Kecamatan	Omset	%
1	Tejakula	4.100.174.420	6,82%
2	Kubutambahan	5.000.084.340	8,32%
3	Banjar	5.565.715.000	9,26%
4	Sukasada	5.825.598.550	9,70%
5	Busungbiu	6.783.010.000	11,29%
6	Seririt	7.211.370.000	12,00%
7	Sawan	7.374.453.350	12,27%
8	Gerokgak	7.721.340.000	12,85%
9	Buleleng	10.501.507.240	17,48%
TOTAL		60.083.252.900	100,00%

Sumber : Dinas PDM Kabupaten Buleleng

Berdasarkan data Dinas PMD Kabupaten Buleleng, total omzet BUMDes mencapai Rp60.083.252.900, dengan kontribusi terbesar berasal dari Kecamatan Buleleng, Gerokgak, dan Sawan. Namun demikian, terdapat tiga kecamatan dengan

kontribusi omzet terendah, yaitu Tejakula (6,82%), Kubutambahan (8,32%), dan Banjar (9,26%). Rendahnya kontribusi omzet ini mengindikasikan skala aktivitas usaha dan intensitas transaksi keuangan yang relatif lebih kecil, yang berpotensi berdampak pada keterbatasan sumber daya manusia, sistem pencatatan, serta kelengkapan laporan keuangan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, baik dari sisi ketepatan waktu, akurasi pencatatan, maupun kesesuaian dengan standar yang berlaku, sehingga laporan keuangan cenderung disusun secara sederhana dan kurang terstandar dibandingkan BUMDes dengan omzet lebih tinggi.

Meskipun jumlah BUMDes di Kabupaten Buleleng telah hampir merata di setiap desa, permasalahan dalam kualitas laporannya masih cukup kompleks. Ketidakmampuan mengelola keuangan dengan baik dapat menghambat pengambilan Keputusan keuangan pada usaha (Martadinata & Pasek, 2024). Beberapa BUMDes mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tahunan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), sehingga informasi yang disajikan menjadi kurang relevan untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan BUMDes setelah Musyawarah Desa menunjukkan rendahnya kualitas laporan keuangan karena berkurangnya nilai relevansi informasi (Dwiyanti & Werastuti, 2024).

Salah satu unsur penting dalam akuntansi adalah kebutuhan akan informasi keuangan sebagai dasar dalam menyeimbangkan pengambilan keputusan tertentu (Purnamawati dkk., 2020). Pada kenyataannya masalah relevansi laporan keuangan BUMDes masih menghadapi permasalahan dari sisi keandalan dan daya banding. Masih terdapat laporan keuangan yang belum sepenuhnya disusun sesuai dengan

Keputusan Menteri Desa PDTT RI Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes, sehingga informasi yang dihasilkan sulit dibandingkan antarperiode maupun antar-BUMDes. Berdasarkan hasil wawancara yang dikutip dalam penelitian Dwiyanti dan Werastuti (2024), Bapak Madong Hartono, S.Pd selaku Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sekaligus Plt. Kepala Bidang Pemerintah Desa pada Dinas PMD Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa sebagian bendahara BUMDes masih kurang memahami akuntansi, yang menyebabkan kesalahan pencatatan transaksi dan laporan keuangan sering kali tidak balance. Kondisi ini mencerminkan rendahnya keandalan laporan keuangan karena belum sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Permasalahan kualitas laporan keuangan BUMDes juga diperparah oleh belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Sistem yang digunakan antar-BUMDes masih belum seragam, di mana sebagian telah memanfaatkan *website* pam.edesaku.org atau aplikasi Sedana Dimata, sementara lainnya masih melakukan pencatatan manual menggunakan *Excel* tanpa adanya pelatihan dan himbauan resmi dari dinas terkait. Selain itu, fungsi dewan pengawas belum berjalan secara maksimal karena pengawasan yang seharusnya dilakukan secara rutin sering kali bersifat insidental, dipengaruhi oleh keterbatasan kompetensi, latar belakang pendidikan, serta adanya intervensi pihak luar dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, pengawasan yang dilakukan belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan BUMDes (Dwiyanti & Werastuti, 2024).

Dengan demikian, meskipun Kabupaten Buleleng memiliki jumlah BUMDes yang besar dan potensi ekonomi yang tinggi, kualitas laporan keuangan BUMDes masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar, baik dari aspek dapat dipahami,

relevansi, keandalan, maupun daya banding. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi penggunaan sistem informasi akuntansi, serta penguatan fungsi pengawasan menjadi kebutuhan mendesak agar laporan keuangan BUMDes dapat disusun secara berkualitas dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan *Resource-Based Theory* (RBT) yang pertama kali diperkenalkan oleh Wernerfelt (1984) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Barney (1991), yang menyatakan bahwa keunggulan kompetitif suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan internal dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Dalam perspektif RBT, organisasi dipandang sebagai kumpulan sumber daya dan kapabilitas yang unik, di mana pengelolaan sumber daya tersebut menjadi kunci dalam mencapai kinerja yang unggul dan berkelanjutan (Barney, 1991). RBT mengklasifikasikan sumber daya strategis ke dalam empat kriteria utama yang dikenal dengan konsep VRIN, yaitu bernilai (*valuable*), langka (*rare*), sulit ditiru (*inimitable*), dan tidak mudah digantikan (*non-substitutable*). Dalam kaitannya dengan kualitas laporan keuangan, RBT memandang bahwa laporan keuangan yang berkualitas merupakan hasil dari kapabilitas internal organisasi dalam mengintegrasikan dan memanfaatkan sumber daya strategisnya secara optimal, sehingga mampu menghasilkan informasi yang relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Dalam konteks BUMDes, terdapat tiga sumber daya internal yang berpotensi menjadi penentu utama kualitas laporan keuangan, yaitu sistem pengendalian internal, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi, yang apabila dikelola sesuai prinsip VRIN dapat mendukung terciptanya transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan kinerja keuangan BUMDes.

Sistem pengendalian internal merupakan kapabilitas penting yang menjaga keandalan informasi keuangan, mencegah kesalahan, dan meminimalisir praktik kecurangan, di mana sistem ini bersifat unik karena dipengaruhi struktur organisasi, budaya kerja, dan mekanisme operasionalnya sehingga menjadi keunggulan kompetitif yang sulit ditiru (Barney, 1991). Selain itu, sumber daya manusia (SDM) berperan sebagai aset strategis yang secara langsung mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan; SDM yang kompeten, berpengalaman, dan berintegritas tinggi mampu menyusun laporan keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu, serta dalam kerangka RBT menjadi aset langka yang menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan BUMDes (Wright dkk., 1994). Pemanfaatan teknologi informasi juga termasuk sumber daya strategis karena mendukung proses akuntansi dan pelaporan keuangan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kesalahan penyajian data, di mana teknologi yang terintegrasi dan sesuai kebutuhan organisasi dapat memberikan keunggulan kompetitif jika sulit diakses atau ditiru (Zhang dkk., 2009). Dengan demikian, kualitas laporan keuangan BUMDes lebih ditentukan oleh kemampuan internal dalam memanfaatkan sumber daya strategis seperti sistem pengendalian internal, SDM, dan teknologi informasi daripada faktor eksternal, sehingga BUMDes dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan pendapat Grant (1996) bahwa kualitas output organisasi sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan sumber daya internal.

Sistem pengendalian internal merupakan seperangkat kebijakan, prosedur, dan metode yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi terkait keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas dan efisiensi operasi dapat tercapai. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008,

sistem pengendalian internal meliputi lima unsur utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dalam perspektif *Resource-Based Theory (RBT)*, sistem pengendalian internal dapat dikategorikan sebagai kapabilitas internal yang bernilai (*valuable*) karena mampu menjaga integritas data keuangan, mencegah kecurangan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi; bersifat langka (*rare*) karena setiap organisasi memiliki struktur dan mekanisme yang berbeda; sulit ditiru (*inimitable*) karena dipengaruhi budaya kerja dan struktur organisasi yang unik; serta tidak mudah digantikan (*non-substitutable*) karena fungsinya yang fundamental dalam tata kelola organisasi.

Akuntabilitas adalah konsep yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi dapat menjelaskan tindakan yang dilakukan kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas politik untuk memeriksa dan mengevaluasi organisasi tersebut (Purnamawati & Rahayu, 2025). Bagi BUMDes, penerapan sistem pengendalian internal yang efektif akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih andal, relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan antarperiode. Dengan demikian, sistem pengendalian internal bukan hanya mekanisme teknis, melainkan sumber daya strategis yang menjadi kunci keunggulan kompetitif BUMDes dalam mengelola potensi desa secara berkelanjutan.

Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dalam berbagai penelitian menunjukkan hasil yang cenderung positif. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Chalif (2022), Purnami (2022), Lestari (2021), Istiawan (2021), Siregar dan Marliyah (2024), serta Fauziah (2022) membuktikan

bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, semakin baik sistem pengendalian internal diterapkan, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Namun demikian, tidak semua penelitian mendukung temuan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Yunita dkk. (2024) serta Kartika dan Ningsih (2024) menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal masih sangat bergantung pada konteks organisasi serta bagaimana sistem tersebut diterapkan dalam praktik.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan potensi manusiawi yang berfungsi sebagai penggerak utama organisasi dalam mencapai tujuannya. Tanady dan Wijaya (2021) menjelaskan bahwa SDM mencakup kemampuan, keterampilan, pengalaman, serta sikap yang diperlukan untuk mewujudkan eksistensi organisasi. Seseorang yang memiliki tugas di bidang keuangan mempunyai tugas untuk mengoperasikan sumber daya yang ada dan memaksimalkannya sehingga memperoleh nilai yang baik dalam usahanya (Sulindawati dkk., 2021). Dalam konteks BUMDes, SDM yang dimaksud adalah pengurus atau staf keuangan yang terlibat langsung dalam proses pencatatan, penyusunan, dan pelaporan keuangan. Peran SDM menjadi sangat penting karena kompetensi, keahlian, dan integritas pengelola akan menentukan ketepatan, relevansi, serta keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Berdasarkan *Resource-Based Theory* (RBT), SDM yang unggul merupakan sumber daya yang bernilai (*valuable*) karena mendukung keberhasilan organisasi, langka (*rare*) karena kompetensi tinggi tidak dimiliki oleh semua individu, sulit ditiru (*inimitable*) karena kombinasi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan bersifat unik, serta tidak

mudah digantikan (*non-substitutable*) karena manusia memiliki kapasitas adaptasi dan pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh sistem atau teknologi. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan BUMDes sangat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan profesionalisme SDM yang mengelolanya. SDM yang mumpuni akan mampu menerapkan prinsip-prinsip akuntansi secara tepat, mengelola sumber daya keuangan desa secara efektif, serta memastikan akuntabilitas kepada masyarakat.

Penelitian mengenai sumber daya manusia (SDM) juga menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Chalif (2022), Purnami (2022), Lestari (2021), Koto (2018), serta Helmy dan Silviana (2024) membuktikan bahwa kompetensi dan kualitas SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan, keahlian, dan profesionalisme SDM merupakan faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal. Namun, tidak semua penelitian memberikan hasil yang sejalan. Widyastuti dan Wulandari (2024) justru menemukan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah. Dengan demikian, meskipun SDM secara umum dianggap krusial, terdapat kondisi tertentu di mana faktor lain lebih dominan dalam memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, sistem jaringan, serta aplikasi untuk mendukung pengolahan, pengelolaan, dan pelaporan data keuangan secara efektif dan efisien. Dalam konteks BUMDes, teknologi informasi mencakup penggunaan sistem akuntansi berbasis komputer, aplikasi pelaporan keuangan, serta internet untuk mempercepat

penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan. Thompson dkk. (1991) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat diukur melalui intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan, serta jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Dalam perspektif *Resource-Based Theory* (RBT), teknologi informasi merupakan kapabilitas yang bernilai (*valuable*) karena mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi pelaporan; langka (*rare*) ketika terintegrasi secara khusus sesuai kebutuhan organisasi; sulit ditiru (*inimitable*) karena memerlukan investasi, adaptasi, dan pelatihan; serta tidak mudah digantikan (*non-substitutable*) karena teknologi yang tepat mampu menciptakan diferensiasi layanan dan proses. Bagi BUMDes, pemanfaatan teknologi informasi yang optimal dapat meminimalisir kesalahan pencatatan manual, mempercepat penyusunan laporan keuangan, dan meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dengan demikian, teknologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai sumber daya strategis dalam mendukung terciptanya laporan keuangan yang berkualitas serta meningkatkan daya saing BUMDes.

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan hasil yang lebih bervariasi. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2022) serta Koto (2018) menemukan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi yang optimal mampu meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi pelaporan keuangan. Namun, Yunita dkk. (2024) menemukan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, yang mengindikasikan bahwa keberadaan teknologi saja tidak cukup tanpa dukungan faktor lain. Lebih lanjut, Oesch dan Walser (2024) bahkan menemukan

bahwa adopsi robot dalam akuntansi justru menurunkan kualitas laporan keuangan karena manajemen cenderung meningkatkan diskresi untuk menutupi biaya adopsi teknologi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan dampak positif, tetapi juga berpotensi menimbulkan efek negatif apabila tidak diimbangi dengan sistem pengendalian yang memadai.

Penelitian ini penting dan memiliki nilai kebaruan karena secara khusus menguji pengaruh sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kecamatan Tejakula, Kubutambahan, dan Banjar yang dikenal memiliki kontribusi omzet signifikan di Kabupaten Buleleng, namun masih menghadapi permasalahan berupa keterlambatan penyampaian laporan keuangan, penyusunan laporan yang belum sepenuhnya sesuai pedoman resmi, rendahnya kompetensi pengelola, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti faktor-faktor tersebut dalam konteks pemerintah daerah atau organisasi publik lainnya, penelitian ini mengintegrasikan ketiga variabel tersebut secara simultan dalam konteks BUMDes serta menggunakan *Resource-Based Theory* (RBT) untuk menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal, SDM, dan teknologi informasi merupakan sumber daya strategis yang dapat menjadi keunggulan kompetitif BUMDes. Oleh karena itu, penelitian ini mendesak dilakukan guna mengisi kesenjangan empiris serta memberikan dasar evaluasi bagi pengelola BUMDes dan pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang dan urgensi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh sistem

pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Dengan menggunakan kerangka *Resource-Based Theory* (RBT), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat literatur terkait tata kelola keuangan sektor desa, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola BUMDes dan pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap pengelolaan keuangan BUMDes yang lebih profesional dan berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Bersumber dari penjelasan pada pembahasan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penelitian yang terjadi sebagai berikut.

1. Meskipun desa memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang melimpah, potensi tersebut belum terintegrasi secara optimal dalam sistem pengelolaan yang solid. Pemanfaatannya masih cenderung bersifat individual dan belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan bersama. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kekayaan desa belum sepenuhnya dikelola secara kolektif untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) secara berkelanjutan.
2. Kontribusi omzet yang rendah pada Kecamatan Tejakula, Kubutambahan, dan Banjar mencerminkan aktivitas ekonomi yang masih terbatas, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Skala

usaha yang kecil biasanya diikuti dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sistem pencatatan yang sederhana, sehingga laporan keuangan rentan kurang lengkap, kurang akurat, atau tidak tepat waktu. Karena itu, wilayah dengan omzet rendah memerlukan penguatan dalam pengelolaan keuangan agar laporan yang disusun tetap andal dan sesuai standar akuntansi.

3. Banyak BUMDes mengalami kendala dalam penyusunan laporan keuangan, mulai dari keterlambatan pelaporan, belum mengacu pada pedoman resmi (Kepmendesa Nomor 136 Tahun 2022), hingga adanya kesalahan pencatatan akibat keterbatasan pemahaman akuntansi pengelola. Laporan keuangan yang dihasilkan sering kali tidak memenuhi karakteristik kualitatif menurut PSAK 1, seperti relevansi, keterandalan, dan daya banding. Akibatnya, transparansi dan akuntabilitas BUMDes dalam mengelola keuangan desa menjadi kurang terjamin.
4. Permasalahan lain yang cukup mendasar adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, terutama bendahara atau pengelola keuangan yang belum memiliki latar belakang akuntansi. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem akuntansi belum optimal karena masih banyak BUMDes yang menyusun laporan secara manual.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan penelitian ini akan difokuskan pada beberapa rincian Batasan masalah sebagai berikut.

1. Sistem Pengendalian Internal

Penelitian ini hanya akan mengukur persepsi pengelola atau staf keuangan BUMDes terhadap efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan di masing-masing BUMDes, bukan melalui audit eksternal. Selain itu Pembahasan sistem pengendalian internal tidak mencakup aspek pengendalian untuk tujuan selain pelaporan keuangan, seperti pengendalian operasional atau kepatuhan terhadap peraturan umum desa, kecuali jika secara langsung berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan.

2. Sumber Daya Manusia

Ruang lingkup SDM dalam penelitian ini dibatasi pada pengelola BUMDes yang terlibat dalam proses pencatatan, penyusunan, dan pelaporan keuangan, seperti bendahara, kepala unit usaha, atau manajer keuangan BUMDes. Selain itu juga Penilaian terhadap kualitas SDM dilakukan berdasarkan persepsi responden melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert, dan tidak dilakukan melalui uji kompetensi teknis secara langsung.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada perangkat lunak dan aplikasi yang digunakan secara langsung dalam proses pencatatan, pengelolaan, dan penyusunan laporan keuangan BUMDes.

4. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang disusun oleh BUMDes dan mencerminkan kondisi keuangan secara akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Selain itu Penelitian ini hanya menilai kualitas laporan keuangan berdasarkan persepsi pengelola atau pihak terkait, dan tidak

dilakukan audit atau penilaian profesional atas isi laporan secara langsung.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDES ?
2. Apakah Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDES ?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDES ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes.
2. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat baik secara praktis maupun teoritis dari hasil penelitian

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi

pengelola BUMDes, khususnya sebagai bahan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi yang telah diterapkan. Dengan adanya temuan penelitian, pengelola dapat mengidentifikasi kelemahan dalam proses penyusunan laporan keuangan dan melakukan perbaikan agar laporan yang dihasilkan lebih akurat, transparan, relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dan pendamping desa sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan atau program pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan BUMDes secara berkelanjutan.

b. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik dan tata kelola keuangan desa. Penelitian ini memperkaya literatur dengan menghadirkan konteks empiris mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, sumber daya manusia, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Lebih jauh, penelitian ini juga berperan dalam menguji dan memperkuat penerapan teori *Resource-Based Theory* (RBT) pada sektor desa, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelaporan keuangan dalam suatu organisasi.